

BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
**PERWAKILAN  
PROVINSI  
MALUKU UTARA**



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

# PERJANJIAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2020

NOMOR : KEP-260/PW33/1/2020  
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2020

[www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)



Jalan Makugawene, Kalumata, Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
		Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	
1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1 Nilai optimalisasi penerimaan Negara/Daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	97	
	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara yang Terealisasi	Rupiah (Juta)	-	
	Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan PAD	Rupiah (Juta)	97	
	1.2 Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	195	
	Potensi Penerimaan Negara yang Dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	-	
	Pengawasan atas Potensi Pendapatan Asli Daerah	Rupiah (Juta)	195	
	1.3 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	0	
	Nilai efisiensi pengeluaran Pemerintah Daerah	Rupiah (Juta)	0	
	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	0	
	1.4 Nilai penyelamatan keuangan negara	Rupiah (Juta)	3,293	
	1.5 Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rupiah (Juta)	-	
	1.6 Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Rupiah (Juta)	-	
	2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	2.1 Jumlah PP yang tercapai sesuai target	Program Prioritas Kegiatan	0
		2.2 Jumlah KP yang diawasi	Prioritas Kegiatan	4
		2.3 Jumlah KP yang tercapai sesuai target	Prioritas Kegiatan	4
		2.4 Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Prioritas Proyek Strategis Nasional	0
2.5 Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target		Program	0	
2.6 Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik		Persen	0	
2.7 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan		Persen	75	
3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	3.1 Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	0	
	Persentase badan usaha dengan pengelolaan korporasinya baik	Persen	-	
	3.2 Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	0	
	Persentase BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	Persen	-	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
		Satuan	Jumlah	
1		3	4	
		2		
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	3.3	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	2
			Persentase BUMD dengan kinerja sehat	18.18
		3.4	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	1
			Persentase BLUD dengan kinerja sehat	5.26
		3.5	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	16
			Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	100
		4.1	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	70
		4.2	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	0
		4.3	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	0
		4.4	Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	6
		5.1	Persentase APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	54.55
		5.2	Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	4
		5.3	Persentase K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	36.36
		5.4	Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI $\geq$ Level 3	0
		5.5	Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI $\geq$ Level 3	0
		5.6	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	1
5.7	Persentase Pemda Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	10		
5.8	Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	0		
5.9	Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	0		
6.1	Persentase jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	1		
6.2	Jumlah APIP yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	34.96		
6.3	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	0		
6.4	Jumlah BUMN dengan MRI $\geq$ Level 3	1		
6.5	Persentase BUMN dengan MRI $\geq$ Level 3	0		
6.6	Jumlah BUMD dengan MRI $\geq$ Level 3	0		
6.7	Persentase BUMD dengan MRI $\geq$ Level 3	0		
6.8	Jumlah BLUD dengan MRI $\geq$ Level 3	0		
6.9	Persentase BLUD dengan MRI $\geq$ Level 3	0		
6.10	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI $\geq$ Level 3	0		
6.11	Persentase BUMD dengan Kapabilitas SPI $\geq$ Level 3	0		
6.12	Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI $\geq$ Level 3	0		
6.13	Persentase BLUD dengan Kapabilitas SPI $\geq$ Level 3	0		
6.14	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100		
6.15	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	100		
6.16	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	100		
6.17	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	100		
6.18	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	86		
6.19	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	90		
6	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja			



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
	6.7 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	100
	6.8 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	Baik 80
	6.9 Nilai SAKIP Unit Kerja	Level 1-5	Level 3
	6.10 Maturitas SPIP Unit Kerja	Level 1-5	-
	6.11 Indeks MR Unit Kerja	Indeks Skala 100	70
	6.12 Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Indeks Skala 100	70
	6.13 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	70

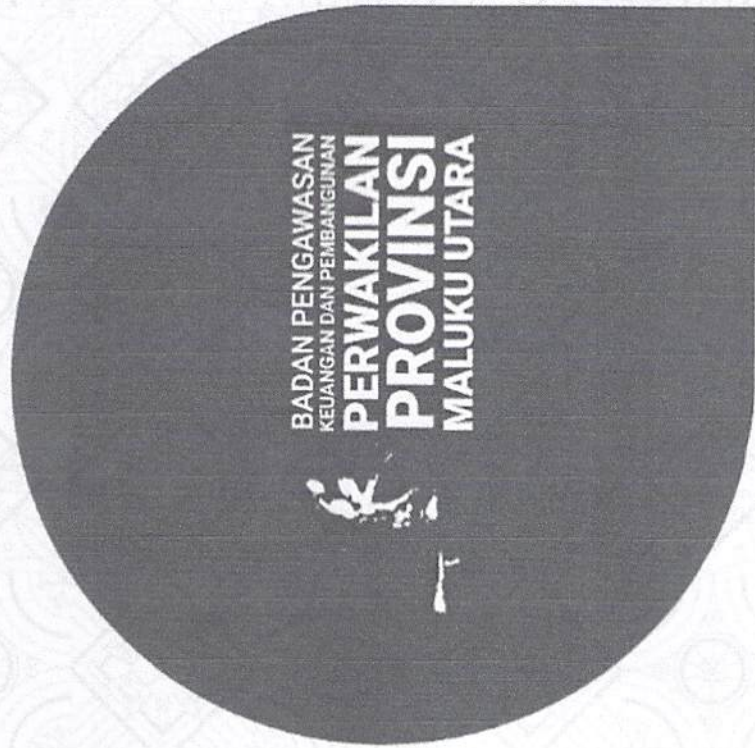
	Anggaran
Rp.	2,996,429,000.00
Rp.	17,261,830,000.00
Rp.	<u>20,258,259,000.00</u>

- Kegiatan Pengawasan Pembangunan di Perwakilan
  - Pelaksanaan Dukungan Manajemen
- Jumlah

Kepala BPKP,

Muhammad Yusuf Ateh  
NIP 19640809 198503 1 001



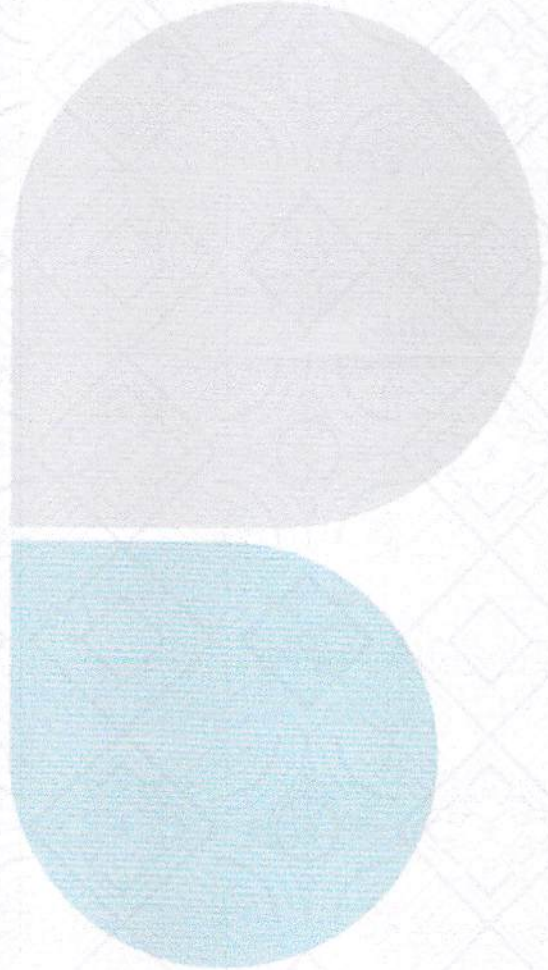


BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
**PERWAKILAN  
PROVINSI  
MALUKU UTARA**



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

**PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA**



[www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)



Jalan Makugawene, Kalumata Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara